

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Batubara, G. T., & Hulukati, S. T. (2020). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA* (hlm. 51–52). Setara Press.
- Isharyanto, & Abdurrachman, A. (2016). *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi* (Isharyanto, Ed.). halaman moeka publishing. www.halamanmoeka.net
- Lamintang, P. A. F., & Theojunior Lamintang, F. (2016). *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (2 ed., hlm. 206–207).
- Khalid, A. (2014). PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *AI ADL*, 6(11), 17.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press
- Mulyana, Y. (2022). *VIKTIMOLOGI 4.0* (kedua). MDP Media.
- Mulyana, Y. (2023). *HUKUM PIDANA BARU DI INDONESIA : KUHP NO. 1 TAHUN 2023* (hlm. 23–24).

UNDANG-UNDANG

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian
- Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Daluwarsa Penuntutan Pidana
- Pasal 160 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
- Pasal 476 UU Nomor 1 tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

SUMBER LAINNYA

- A. Walandouw, R. (2020). UNSUR MELAWAN HUKUM YANG SUBJEKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PASAL 362 KUHP. *Lex Crime*, 9(3).
- Anandia, I. G. A. A. S., Arjaya, I. M., & Karma, N. M. S. (2019). Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan. *Jurnal Analogi*, 1(2), 0–4. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1752>

- Ayu Pitaloka, Z., & Rosmaya, I. (2022). TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH LAKARSANTRI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 31/PID.B/2021/PN.SBY). *judiciary*, 11(2), 1.
- Despar Magrhabi, berdy, Ismail Navianto SH. MH, D., & Madjid SH. MH, A. (2014). TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTORPENYEBABTERJADINYATINDAK PIDANAPENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang). *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1–3.
- Entriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>
- Febriani, K. I. (2018). DALUWARSA PENUNTUTAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP). *Lex Crimen*, 7(1), 1–3.
- Hartono, toto, & Lubis, ansori. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN). *Jurnal Retentum*, 2(1), 36.
- Harun, H., Wantu, F. M., & Rahim, E. I. (2023). *PENUNTUT UMUM “ Application Of The Principle Of Contante Justitie To The Efficiency Of Delivery Of Case Doubts From Investigators To Public Prosecutors .”* 145–170.
- Johnny Lembong, & Rompis, T. (2020). Persoalan Prapenuntutan Dalam Perkara Pidana Menurut Kuhap. *Lex Crimen*, IX(3), 180–187.
- Kurniawan, eka, pangaribuan, piatur, & rosdiana. (2019). TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELAKU PENCURIAN DI KOTA BALIKPAPAN DIKAITKAN DENGAN NORMA KESUSILAN. *uniba law review*, 1(1), 71.
- Mariana, G., & Wahyoeno, D. (2023). Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 663–678. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.209>
- Mas respati artika, rigen, rumimpunu, dientje, & tampi, butje. (2020). PENCURIAN ANTAR ORANG YANG PUNYA HUBUNGAN KELUARGA TERTENTU SEBAGAI DELIK ADUAN RELATIF MENURUT PASAL 367 AYAT (2) KUHP. *lex privatum*, 8(4), 240.

- Maswandi. (2017). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja D Pengadilan Hubungan Industrial. *Jurnal Ilmu AdministrasinPublik*, 5(1), 40.
- Muaidi, L. (2019). PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 240/Pid.B/PN Pya). *Universitas Mataram*, 1–2.
- Muliadi, saleh. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–7.
- Naftali, R., & Ibrahim, A. L. (2021). Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online. *Esensi Hukum*, 3(2), 144–157. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>
- Nyoman Jaya Kesuma dan Wayan Agus Vijayantera. (2020). Perundingan Bipartit Sebagai Langkah Awal Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal Hukum Saraswati*, 2(<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/issue/view/82>), 70. [file:///C:/Users/my notebook/Downloads/I+Nyoman+Jaya+Kesuma.pdf](file:///C:/Users/my%20notebook/Downloads/I+Nyoman+Jaya+Kesuma.pdf)
- Rinaldi, F. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Respublica*, 179–188.
- R.Wenas, N. (2020). GUGURNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA KARENA DALUWARSA BERDASARKAN PASAL 78 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex Et Societatis*, 8(4), 240.
- Safudin, E. (2018). *ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBRITASE* (hlm. 62–63).
- Saputra, R. P. (2019). PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA. *pahlawan*, 2(2), 1–2.
- Syariah, P. P. (2017). *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017* 49. 8(2), 49–61.
- Walandouw, rony. (2020). UNSUR MELAWAN HUKUM YANG SUBJEKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PASAL 362 KUHP. *Lex Crime*, 9(3), 252.